

PENERAPAN PEMADANAN NIK-NPWP DI MAS AL FAJAR

ZAHARMAN¹; SERLY NOVIANTI²; ARINI³

FEB Universitas Lancang Kuning
Jln. Yos Sudarso KM 08 Rumbai Telp. (0761) 52581
E-mail : serly@unilak.ac.id (Korespondensi)

Abstract: Given the importance of the Application of NIK-NPWP Matching at MAS AL FAJAR to support tax reform in Indonesia, it is one of the manifestations of community service activities (PKM) in taxation. So the authors carry out activities to implement the NIK-NPWP matching at MAS AL FAJAR.

The methods of activities that will be carried out in order to achieve the objectives of this community service include: 1) Pretest: in the form of a questionnaire given before the mentoring activities (lectures and discussions) begin. 2) Direct discussion and dialog: in the form of material delivery, consisting of messages (verbal and nonverbal), namely the form of information or explanation conveyed to participants. Counseling media: consists of: pictures or slides (PPT), which are counseling media that contain displays of counseling messages. 3) Submission of plaques from the service team to partners. 4) Posttest: in the form of a questionnaire given after the counseling activity is completed. This is intended so that partners really feel the benefits of this Community Service Program activity, and can feel that this Community Service Program activity is incidental only, whenever they need knowledge assistance, the proposer will respond.

Participants who participated in the application of NIK-NPWP matching activities at Madrasah Aliyah Swasta Al Fajar totaled 10 people. The results of the service have successfully carried out NIK-NPWP matching at MAS Al Fajar school to the teachers who teach there.

Keywords: NPWP, NIK, e-SPT, Knowledge, Tax Reporting, OP

Dalam Peraturan Menteri Keuangan No.112/PMK.03/2022. DJP menghimbau agar masyarakat melakukan validasi NIK sebagai NPWP untuk pelaporan SPT Tahunan 2022. hal ini akan berkaitan dengan administrasi dalam perpajakan. apabila tidak dilakukan maka akan berdampak kepada WP itu sendiri, bisa kesulitan dalam membuka akses seluruh layanan perpajakan secara digital. Pastinya ini sangat merugikan WP sendiri.

Peraturan perubahan validasi NIK-NPWP ini masih bisa dilakukan paling lambat sampai dengan 31 Desember 2023. Untuk tahun 2024 sudah harus tervalidasi semua NIK dari NPWP masing-masing WP.

Kantor Pelayanan Pajak merupakan unit kerja Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang memberikan pelayanan perpajakan kepada orang yang terdaftar sebagai wajib pajak. Sistem dan struktur KPP semakin baik dari tahun ke tahun berkat perkembangan teknologi dan informasi saat ini.

Dengan fasilitas pelayanan pajak yang semakin mudah hendaknya masyarakat taat pajak dan kepada direktorat jenderal pajak agar dapat mensosialisasikan tentang pemahaman pajak kepada masyarakat, Sehingga masyarakat memiliki kesadaran pentingnya pajak bagi pembangunan suatu daerah, sehingga menumbuhkan animo masyarakat untuk membayar pajak” ujar Syamsul Bahri (2019).

Direktur Kanwil DJP Riau Edward mengatakan peningkatan kesadaran perpajakan penting untuk pembangunan daerah, mengingat pajak merupakan salah satu pendapatan utama daerah (PAD), diharapkan kehadiran KPP di wilayah Kampar dapat menyerap pajak bahkan lebih optimal. “Kantor pajak di Kampar sudah ada dua, yaitu Sukarama, Kabupaten Tapung Hulu, dan Bangkinang Kota. Kami akan membuka lebih banyak layanan seperti itu ke depan dan terus melatih wajib pajak”.

Menurut Peraturan Direktorat Jendral Pajak Nomor 47/PJ/2008 Pasal 1 Ayat 7 pengertian e-filing adalah suatu cara penyampaian SPT dan penyampaian Pemberitahuan Perpanjangan SPT Tahunan secara elektronik yang dilakukan secara online dan real time melalui Penyedia Jasa Aplikasi.

Penyampaian pelaporan kewajiban pajak (SPT) secara elektronik dengan e-filing menggunakan aplikasi e-SPT atau SPT elektronik merupakan permintaan Direktur Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan untuk memfasilitasi penyampaian SPT untuk kepentingan wajib pajak. Wajib Pajak mendapatkan manfaat dari proses penyampaian SPT, antara lain (<https://www.online-pajak.com>):

- 1) Mempermudah pendaftaran data SPT di database DJP. Jika sebelumnya pendaftaran data dilakukan secara manual dan memakan banyak waktu, kini dengan bantuan sistem pelaporan pajak online pasti akan lebih menghemat waktu.
- 2) Mengurangi pertemuan langsung wajib pajak dengan otoritas pajak. Wajib Pajak tidak lagi harus selalu datang ke KPP, apalagi terjebak kemacetan, hanya untuk melaporkan pajaknya.
- 3) Mengurangi dampak antrian dan beban kerja proses penerimaan SPT. Tujuan adanya laporan SPT adalah untuk mengurangi jumlah wajib pajak yang datang ke KPP, sehingga tidak terjadi lagi antrian yang panjang.
- 4) Mengurangi berkas fisik/dokumen pajak kertas. Dengan menggunakan sistem online tentunya akan mengurangi penggunaan kertas atau dokumen dengan wajib pajak, serta resiko kehilangan dan kerusakan selama penyimpanan.

MAS (Madrasah Aliyah Swasta) Al Fajar berlokasi strategis. Maka dari itu, penulis melaksanakan kegiatan penerapan pematangan NIK-NPWP Mengingat pentingnya membantu dan menerapkan

kepada guru MAS Al Fajar untuk mendukung reformasi perpajakan Indonesia, pematangan NIK-NPWP ini merupakan salah satu wujud kegiatan pengabdian kepada masyarakat (PKM) di bidang perpajakan.

Penelitian (Kepuasan et al., 2012) menyebutkan bahwa kebermanfaatan, kemudahan dan kepuasan pengguna mempengaruhi tingkat penggunaan e-filing. Sebagai aksi nyata terkait kegiatan tridharma perguruan tinggi dalam pelaksanaan khususnya pengabdian hakikatnya merupakan suatu hal pengaplikasian ilmu yang disampaikan selama proses perkuliahan dengan harapan dapat membantu masyarakat dan memperbaiki system perpajakan di Indonesia. Target dari kegiatan pengabdian ini adalah masyarakat atau wajib pajak orang pribadi, khususnya guru-guru MAS Al Fajar. Tujuan dari kegiatan ini antara lain : membentuk kepedualian terhadap masyarakat untuk wajib pajak dalam hal membantu masyarakat melakukan validasi NIK dari NPWP yang terdiri dari 15 digit.

Dalam mendukung penelitian tersebut dan keikutsertaan dalam mendukung reformasi perpajakan di Indonesia maka penerapan pematangan NIK-NPWP menjadi salah satu perwujudan kegiatan pengabdian kepada Masyarakat (PKM) dalam perpajakan. Maka penulis melakukan kegiatan pendampingan untuk para guru MAS Al Fajar.

Hasil identifikasi terhadap permasalahan yang dihadapi dari berbagai sudut pandang yang relevan:

- 1) Kurangnya pengetahuan masyarakat tentang info terupdate dalam perpajakan
- 2) Kurangnya kesadaran masyarakat hal pembaruan data WP untuk segera divalidasi NIK-NPWP
- 3) Kurangnya informasi yang diterima para guru dilingkungan sekolah

METODE

Metode kegiatan yang akan dilakukan demi tercapainya tujuan pengabdian kepada masyarakat ini meliputi:

- 1) Pretest: berupa kuesioner yang diberikan sebelum kegiatan pendampingan (ceramah dan diskusi) dimulai.
- 2) Diskusi dan dialog langsung: berupa penyampaian materi e, terdiri dari pesan (verbal dan nonverbal), yaitu bentuk informasi atau penjelasan yang disampaikan kepada peserta. Media Penyuluhan: terdiri dari: gambar atau slide (PPT), yaitu media penyuluhan yang mengandung tampilan pesan-pesan penyuluhan.
- 3) Postest: berupa kuesioner yang diberikan setelah kegiatan penyuluhan selesai

HASIL

Peserta yang mengikuti kegiatan penerapan pemadanan NIK-NPWP di Madrasah Aliyah Swasta Al Fajar berjumlah 10 orang. Dari kuisisioner yang disebarkan tidak ada satu pun yang memahami bagaimana pemadanan nik dan npwp,. Adapun materi yang di berikan oleh pihak mediator sangat memberikan pengetahuan yang luas tentang pentingnya pemadanan nik- npwp dan bagaimana cara melakukannya, sehingga hasil kuisisioner setelah pelaksanaan pengabdian menunjukkan semua peserta memahami dengan jelas. Hal ini terlihat dari antusiasme peserta dalam tanya jawab bersama tim mediator yang memahami betul secara teknik dibidangnya.

Selain memberikan pengetahuan yang sangat bermanfaat bagi masyarakat , pihak dosen yang langsung menjadi pemateri dan juga sangat berterimakasih atas antusiasme masyarakat . makanya kami tim pengabdian dari unilak bekerjasama untuk menyebarkan terkait peraturan perpajakan terbaru yang akan berakhir dalam waktu dekat ini yaitu akhir tahun 2023.

Adapun hasil yang dibicarakan selama pengabdian berkaitan pemadanan NIK-

NPWP, Telah berhasilnya dilakukan pemadanan NIK-NPWP di sekolah MAS Al Fajar.



Foto : saat pemadanan NIK-NPWP di Madrasah Aliyah Swasta Al Fajar berlangsung

PEMBAHASAN

Dari 10 peserta yang mengikuti penerapan pemadanan NIK-NPWP ini, tingkat keberhasilan sudah cukup tinggi sebanyak 6 orang. Sisanya masih terdapat kendala . yaitu di saat penginputan , ada beberapa peserta yang lupa password, hal ini menghambat dalam pengerjaan pemadanan NIK-NPWP. Dan kami menyarankan agar segera langsung melaporkan ke bagian kantor pajak yang bisa di hubungi baik secara online maupun offline.

Disaat pengabdian berlangsung

sangat antusias sekali peserta dalam mengikuti kegiatan ini hal ini terlihat dari partisipasi dalam bertanya jawab dengan tim penyaji. Kami berharap peserta yang belum berhasil tadi bisa menyelesaikan malakukan pematangan NIK_NPWP sebelum akhir tahun 2023 ini.

SIMPULAN

Kesimpulan dari pelaksanaan kegiatan ini adalah:

- 1) Peserta pelatihan dapat memiliki pengetahuan terupdate tentang perkembangan perpajakan.
- 2) Peserta pelatihan dapat menyadari peran penting perpajakan dalam kehidupan .
- 3) Peserta pelatihan memiliki keikutsertaan dalam melaksanakan perpajakan.

Dengan dilakukannya pematangan NIK-NPWP di sekolah MAS (Madrasah Aliyah Swasta) Al Fajar. Guru-guru yang tadainya masih belum mengetahui dan memahami cara pematangan NIK-NPWP, saat ini sudah divalidasikan. Sehingga untuk pelaporan SPT tahun 2023 mendatang yang akan dilaporkan di bulan maret tahun 2024 sudah bisa menggunakan KTP.

DAFTAR RUJUKAN

- Direktorat Jenderal Pajak. 2005. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP05/PJ/2005 tentang “Tata Cara Penyampaian Surat Pemberitahuan secara Elektronik”. Jakarta.
- Direktorat Jenderal Pajak.2008. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 47/PJ/2008 tentang “Tata Cara Penyampaian Surat Pemberitahuan dan Penyampaian Pemberitahuan Perpanjangan Surat Pemberitahuan Tahunan Secara Elektronik (E-Filing) melalui Perusahaan Penyedia Jasa Aplikasi (ASP). <http://kamparkab.go.id/>
- Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bangkinang . 2019. Direktorat Jendral Pajak, <http://www.pajak.go.id/e-filing>.

- Kementerian Keuangan. (2013). Mudahnya Pelaporan Pajak Melalui e-filing.Kemenkeu.Go.Id. https://www.kemenkeu.go.id/sites/default/files/artikel_pajak_0312.pdf.
- Kepuasan, D. A. N., Pajak, W., Penggunaan, T., Pajak, E. B. W., Yogyakarta, D. I., Negeri, U., & Per-, P. (2012). 988-3059-1-Pb. Nurul, Citra, I, 15–22.
- Marliana, R., Suherman, M., & Almunawwaroh, M. (2017). Pengaruh Penerapan E-Filing Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Penyampaian Surat Pemberitahuan (Spt) Tahunan Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kota Tasikmalaya. Media Riset Akuntansi, Auditing & Informasi, 15(1), 49–64.
- Syamsul Bahri (2019). <https://kominfosandi.kamparkab.go.id/2019/10/17/kantor-pelayanan-pajak-pratama-bangkinang-resmi-dibuka/>.